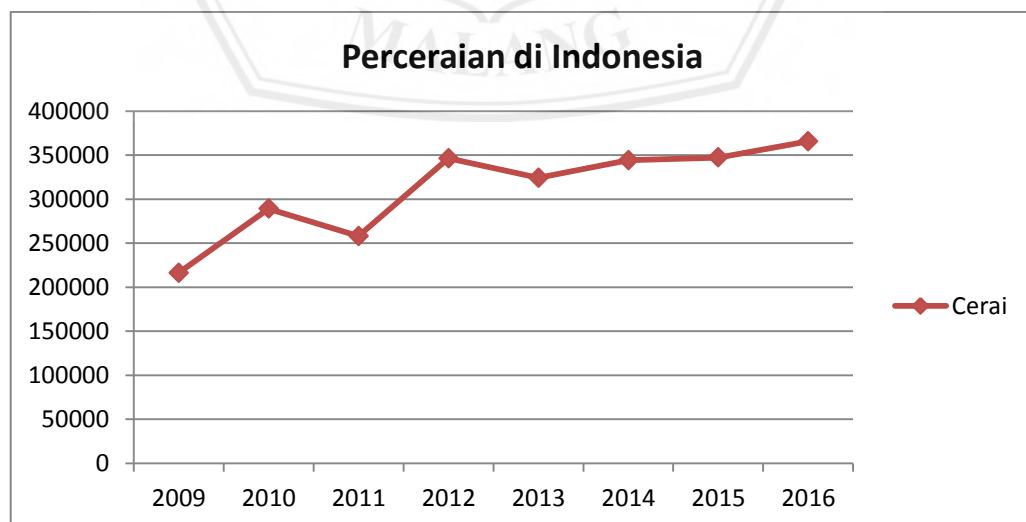


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena yang marak dan menarik untuk dikaji dewasa ini yaitu perceraian justru dilakukan oleh pihak istri yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dikenal dengan istilah gugat cerai (dimana istri mengajukan gugatan perceraian) lebih tinggi daripada cerai talak (dimana suami mengajukan permohonan menalak istri). Merujuk pada data yang dikeluarkan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada tahun 2016 terdapat 365.000 kasus perceraian yang diterima diseluruh Indonesia. Sebesar 67% diantaranya dikabulkan. Artinya lebih dari 244.550 pasangan menikah telah resmi bercerai selama tahun 2016, dan terdapat 42 sidang perceraian perjam setiap harinya. Oleh karenanya kasus Perceraian memiliki rasio tertinggi hingga 84% dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama.



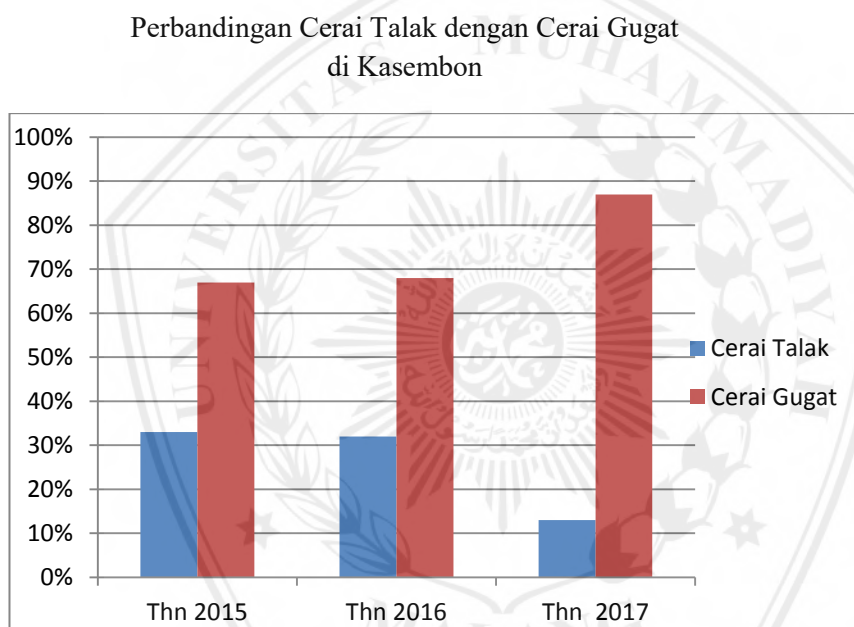
Gambar 1. Perceraian di Indonesia tahun 2009 - 2016

Sumber : Dirjen Badan Peradilan Agama MA

Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, kenaikan perceraian mengalami kenaikan sebesar 16-20% sejak tahun 2009 hingga tahun 2016. Terdapat lebih dari 224.000 gugatan cerai yang berasal dari pihak perempuan atau sebanyak 70% merupakan gugat cerai, sedangkan 30% merupakan cerai talak atau dari pihak laki-laki yang mengajukan cerai sebanyak 90.000 gugatan cerai. Pada tahun 2015, kota Indramayu menjadi kota dengan mayoritas gugatan cerai terbanyak seIndonesia yaitu sebanyak 9.444 kasus . Sedangkan daerah dengan angka pelonjakan perceraian tertinggi seIndonesia adalah Banyuwangi Jawa Timur yang mencapai lebih dari 30%.(CNN Indonesia, 2017)

Angka perceraian di Kabupaten Malang juga cukup memprihatinkan. Menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2016 total perceraian mencapai angka 8529 kasus. Tingginya angka perceraian tersebut menjadikan Kabupaten Malang menduduki peringkat ke dua seIndonesia setelah Indramayu pada tahun 2016. Sementara itu selama kurun waktu januari hingga 13 September 2017 terdapat 5697 perkara gugat perceraian. Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima rata-rata sebanyak 633 perkara kasus perceraian setiap bulan di tahun 2017. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang Lilik Mulyana mengungkapkan bahwa mayoritas perceraian didominasi oleh gugatan pihak istri. Menurutnya pemicunya adalah masalah ekonomi dan banyaknya perempuan yang bekerja di luar negeri.(<https://www.youtube.com/arematv>).

Fenomena tingginya gugat cerai juga terjadi di Kasembon Kabupaten Malang. Merujuk data perceraian KUA Kasembon dapat diketahui bahwa prosentase perceraian di Kasembon pada tahun 2015 untuk talak cerai sebesar 33% dan gugat cerai sebesar 67%, tahun 2016 untuk talak cerai sebesar 32% dan gugat cerai sebesar 68%, tahun 2017 cerai talak sebesar 14% dan gugat cerai sebesar 86%. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa prosentase gugat cerai selalu lebih besar daripada cerai talak dari tahun ke tahun. Bahkan gugat cerai mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2017.



Gambar 2. Angka Prosentase Talak dan Gugat Cerai Kasembon
Sumber : KUA Kasembon Tahun 2015-2017

Pilihan untuk melakukan gugat cerai bukanlah merupakan suatu hal yang mudah bagi perempuan, apalagi ketika telah hadir seorang anak di tengah-tengah kehidupan perkawinan mereka. Akan tetapi persoalan yang muncul dalam kehidupan perkawinan seakan tidak pernah usai hingga tindakan menggugat cerai acapkali menjadi pilihan terakhir. Berikut ungkapan beberapa subyek yang telah diwawancarai tentang bagaimana mereka memaknai perceraian;

“Saya sudah tidak tahan lagi selalu tersiksa dan menderita setiap saat. Tiap kali saya menasihati agar tidak minum minuman keras, suami malah kalap, marah, memaki, mengumpat dan memukul sesuka hatinya bahkan menendang perut saya, padahal saya sedang hamil. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya bisa meninggal jika terus bertahan. Dengan berlumuran darah dan air mata saya meminta tetangga untuk mengantarkan ke rumah orangtua.”

Berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti dari informan dilapangan dominasi kasus gugat cerai oleh para istri, dilatarbelakangi oleh banyak faktor sebagai penyebabnya antarlain: hubungan sudah tidak harmonis atau tidak ada kenyamanan dalam rumahtangga, tidak ada tanggung jawab khususnya terhadap anak, kekerasan dalam rumahtangga, kehadiran pihak ketiga, persoalan ekonomi, perkawinan anak, hubungan jarak jauh, jarang pulang ke rumah/sering meninggalkan rumah tanpa ada kabar, malas bekerja, kikir/pelit, bosan/ingin mendapatkan yang lebih baik, tidak ada rasa cinta, diabaikan, mertua cerewet dan suka ikut campur. Berikut beberapa keterangan dari informan penggugat cerai terkait tindakan menggugat cerai suaminya :

“Saya udah gak kuat, suamiku suka main tangan. Sejak saya hamil suami mulai kasar. Sering memukul tanpa alasan yang jelas. Ketika saya sedang menidurkan bayi , tiba-tiba tubuh saya dipukuli dengan kayu kolonjono sambil melontarkan kata kasar dan menyuruh segera ke kandang memerah sapi. Selain itu penghasilan suami juga pas-pasan bahkan kurang untuk mencukupi kebutuhan anak. Belum lagi ibu mertua yang cerewet dan suka mengatur. Saya sudah mencoba mengalah, bersabar dan bertahan demi anak. Tapi saya udah tidak kuat lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan suami.

“... Tiga bulan awal pernikahan suami masih memberikan uang belanja hingga bulan selanjutnya sama sekali tidak pernah memberikan uang belanja dengan alasan belum dapat gaji. Padahal teman kerjanya mengatakan ia dan suami selalu dapat gaji. Sayapun mencari suami dan mendapatinya sedang dekat dengan wanita lain. Selama ini uangnya diberikan kepada wanita itu. Pada

saat itu saya sedang mengandung. Sejak itu saya sering bertengkar. Akhirnya saya pulang ke rumah orangtua di Gobet. Akhirnya saya memutuskan menggugat cerai suami. Agar tidak berlarut-larut urusan cerai saya mengatakan kalau suami sudah meninggal. Saya hanya menjalani 1x sidang dan satu bulan selanjutnya akta cerai sudah jadi.....”

“Saya menikah kurang dari tiga bulan lamanya. Setelah lulus SMP saya dinikahkan. Suami jarang sekali pulang dan memberi uang. Berangkat pagi pulang pagi. Suami saya pendiam dan jarang berkomunikasi. Saya tidak betah dan minta diantarkan ke orangtua.....”

Itulah beberapa kisah tentang tindakan para istri yang menggugat cerai suaminya yang diceritakan kepada peneliti. Cerita pertama berasal dari informan yang bernama Sriyana yang kebetulan adalah teman SMP peneliti. Sriyana berasal dari keluarga kurang mampu. Ia adalah seorang yang sederhana, cukup ramah dan baik. Setelah bertahun-tahun peneliti baru bertemu secara tidak sengaja di Kecamatan. Peneliti terkejut melihat penampilannya yang berubah drastis seperti artis cina. Sriyana bercerita singkat tentang kehidupannya dan beberapa hari kemudian peneliti mendatangi rumahnya untuk melakukan wawancara. Setelah lulus SMP Sriyana bekerja dan memiliki seorang pacar. Ia berencana mengenalkan kepada orangtuanya. Namun orangtuanya tidak setuju dan menjodohkan dengan pria lain. Dengan berat hati dan sedih Sriyana memutuskan pacarnya dan mengikuti perjodohan orangtuanya. Selama menjalani pernikahannya ia merasa tidak bahagia. Suaminya tertutup, pendiam, suka melamun dengan pandangan kosong dan tiba-tiba memukulinya tanpa alasan yang jelas. Tindakan kasar suami acapkali ia terima. Suaminya juga memberi uang yang pas-pasan bahkan kurang untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Diperparah dengan ibu mertuanya yang sangat cerewet dan suka mengatur. Sriyana masih

mencoba bersabar dan mempertahankan keluarganya demi anaknya. Akan tetapi sikap suaminya tidak kunjung berubah dan ia tidak kuat lagi menahan penderitaannya. Iapun meninggalkan suaminya. Sriyana menitipkan putri semata wayangnya kepada orangtuanya di Rekesan, sedangkan ia pergi mencari kerja ke Hongkong. Setelah 5 tahun bekerja di Hongkong Sriyana kembali pulang menyewa pengacara dan menggugat cerai suaminya.

Cerita kedua berasal dari perempuan yang masih muda berusia 27 tahun bernama Tika. Ia menikah di usia 18 tahun ketika masih bekerja di tempat familinya yang ada di Kalimantan. Tika adalah sosok perempuan manis, periang, blak-blakan, suka berdandan bermake up cukup tebal dan memakai pakaian seksi. Menurut keterangan ia menggugat cerai suaminya karena suaminya selingkuh dan tidak memberi nafkah. Akhirnya Tika memutuskan mencari pengganti pendamping hidup dan menggugat cerai suaminya. Menurut tetangganya Tika sudah memiliki pacar baru sebelum bercerai dengan suaminya.

Cerita ketiga keempat berasal dari perempuan yang masih muda berusia 21 tahun bernama Sindi Rahayu. Ia berasal dari keluarga yang cukup mampu. Akan tetapi adat yang berkembang dalam masyarakat di Dusun Kampungan yaitu merupakan prestise bagi keluarganya jika anaknya sudah menikah di usia muda dan merupakan aib jika anaknya hingga usia 25 tahun belum menikah. Sindi menikah setelah lulus SMP atas perjodohan keluarganya. Setelah menikah Sindi tinggal bersama suaminya. Suami Sindi jauh lebih tua dan pendiam. Sindi dan suaminya jarang melakukan komunikasi. Suaminya pun jarang pulang ke rumah. Sindi merasa kesepian dan bosan. Belum genap 3 bulan

pernikahannya Sindi meminta agar dipulangkan ke orangtuanya dan menggugat cerai suaminya.

Hal-hal tersebut semakin meningkat dewasa ini karena adanya pergeseran budaya perceraian dalam masyarakat yang menganggap perceraian bukanlah hal tabu tapi sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari, menurunnya makna dan nilai perkawinan, serta lemahnya pemahaman agama. Pernikahan tidak lagi menjadi hal yang sakral dalam kehidupan manusia. Mudahnya memutuskan untuk menikah dan mudah memutuskan bercerai seakan semudah membalikkan tangan. Seperti halnya yang terjadi pada beberapa perempuan yang menggugat cerai suaminya yang telah bercerita kepada peneliti. Salah satunya yang bernama Sindi Rahayu yang menikah pada usia yang masih sangat muda yakni 16 tahun dan menggugat cerai suaminya setelah tiga bulan lamanya berumah tangga.

Pernikahan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Menurut hukum Islam, tujuan pernikahan di antaranya membentuk keluarga yang bahagia lahir batin dan sejahtera penuh kasih sayang selama hidup. Hal ini sesuai kitab suci Al-qur'an (ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa pertemuan laki-laki dan perempuan dalam jalinan sebuah rumah tangga adalah untuk saling memberikan ketenangan dan ketenteraman serta kasih sayang. Sedangkan tujuan pernikahan menurut UU RI

nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan mimpi buruk bagi kehidupan berumah tangga. Harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, harmonis, sejahtera secara lahir dan batin hingga nafas terakhir dalam kehidupannya menjadi kandas dengan terjadinya perceraian. Perceraian juga mengubah kehidupan baik kedua individu yang bercerai juga anak-anaknya. Meskipun demikian perceraian acapkali terdengar dan terjadi hampir setiap saat di semua lapisan masyarakat. Cahyadi Takariawan penulis dan konsultan Rumah Keluarga Indonesia mencatat setiap hari rata-rata terjadi perceraian di Indonesia sebanyak 959, atau 40 perceraian setiap jam.

Dalam konteks hukum positif, perceraian diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat tiga istilah yang digunakan, yaitu cerai talak, cerai gugat, dan khulu'. Istilah talak merupakan cerai yang dilakukan oleh suami kepada istri. Cerai gugat merupakan cerai yang dilakukan atas inisiatif istri. Sedangkan khulu merupakan perceraian suami dan istri dengan keridhaan atas keduanya disertai dengan pembayaran oleh pihak istri kepada suaminya. Terdapat 35 pasal yang membahas talak dan berbagai prosedurnya, yaitu pasal 113 s.d 148.

Hal ini menunjukkan bahwa masalah perceraian merupakan persoalan yang penting dalam kehidupan.

Fenomena baru yang menjadi pemicu terjadinya perceraian adalah penggunaan media sosial. Di sejumlah kota misalnya Bekasi dan Depok, penggunaan media sosial yang semakin berkembang dan meningkat dituding sebagai penyebab terjadinya perceraian. Pengadilan Negeri Agama Bekasi mencatat perceraian akibat sosial media terus meningkat, mencapai ratusan kasus setiap bulannya. Panitera Pengadilan Agama Kota Depok Entoh Abdul Fatah juga menyebutkan bahwa ratusan pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat, bercerai karena penggunaan media sosial. (okezonenews, 6 oktober 2017). Di kota Bekasi 80% penyebab perceraian adalah pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan jumlahnya mencapai angka 1862 perkara, dimana media sosial memberikan pengaruh terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sementara di Depok Jawa Barat angka perceraian hingga agustus 2017 sebanyak 157 kasus. Dari data persidangan mayoritas pasangan suami istri yang bercerai diakibatkan timbulnya kecemburuan yang bermula di media sosial. (TVone, Apa kabar Indonesia).

Adanya payung hukum terhadap undang-undang PKDRT turut membantu tindakan perempuan menggugat cerai. Keberadaan Komnas Ham juga dapat mendukung terjadinya gugatan cerai oleh perempuan. Menurut Yuniarti Chuzaifah wakil ketua Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa sepanjang lima tahun terakhir sebanyak 260.000 perempuan mengalami kekerasan dan melaporkan yang dialaminya ke Komnas Ham, dan menyebutkan pelaku

kekerasan terbanyak sebesar 80% dilakukan suami. Sehingga tindakan gugatan cerai yang dilakukan perempuan dilakukan untuk mengakhiri rantai kekerasan yang dialaminya. (CNN Indonesia, 8 oktober 2017). Perceraian diartikan sebagai tindakan sosial perempuan untuk mengakhiri penderitaannya.

Maraknya tindakan gugat cerai juga ditengarai kaum perempuan semakin sadar dengan tuntutan kesetaraan dalam kehidupan berumahtangga. Seperti yang dikemukakan oleh Kasandra Putranto seorang psikolog keluarga yang mengatakan bahwasanya perempuan masa kini lebih mengetahui akan hak-haknya dan lebih berani menyuarakan hak-haknya tersebut serta didukung dengan adanya sarana untuk mengadu. Sehingga dalam kehidupan berumahtangga perempuan tidak lagi menjadi pihak yang selalu disalahkan apabila terjadi ketidakharmonisan dalam pernikahan apalagi jika didalamnya terdapat unsur kekerasan hingga berujung pada perceraian.

Tindakan sosial perempuan mengugat cerai tentunya dapat diterima pada masyarakat yang menjunjung tinggi asas kesetaraan gender. Dr. Hasbi dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung menyatakan bahwa terkait alasan banyaknya cerai gugat dalam masyarakat disebabkan oleh Kesetaraan Gender, Tidak ada lagi perbedaan status sosial ekonomi. Banyak wanita yang memiliki penghasilan lebih baik daripada pasangannya. Wanita memiliki hak yang sama dengan suami dalam mengajukan gugatan cerai. Perubahan posisi perempuan dari obyek ke subyek perceraian ini, besar kemungkinan terkait dengan besarnya akses sosial ekonomi yang didapatkan oleh perempuan. Kemandirian perempuan dalam hal ekonomi diasumsikan menjadi pemicu keputusan perceraian. Inilah yang menjadi dasar bagi pandangan kemandirian

ekonomi perempuan akan memungkinkan perempuan untuk memilih perceraian sebagai tindakan rasional dalam menyelesaikan krisis pernikahan.

Tingginya angka gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak perempuan dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi bahwa perempuan berani dan semakin sadar dalam menyuarkan hak-haknya. Perempuan saat ini mudah mendapat akses tentang kesetaraan gender, mudah mendapatkan pendampingan (advokasi) dari lembaga pemberdayaan perempuan. Produk hak asasi manusia yang terpublikasikan dengan baik di masyarakat membuat perempuan semakin paham akan hak dan kewajibannya. Ini turut melatarbelakangi perempuan untuk lebih berani mengajukan gugatan cerai. Ditilik dari perspektif ini, yang sesuai dengan konsep feminisme liberal, maraknya gugatan cerai yang dilakukan para perempuan merupakan suatu hal yang positif. Artinya, jika tindakan sosial perempuan untuk bercerai dilatarbelakangi oleh tercederainya hak-haknya dalam rumah tangga, maka hal itu tidak bisa disalahkan. Bahkan, hal itu perlu sebagai penegasan eksistensi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan persamaan kedudukan dengan laki-laki.

Berdasarkan data perceraian di Kasembon tahun 2015-2017 dapat diketahui bahwasanya terjadi perubahan tren perceraian yaitu talak menjadi gugat. Kondisi tersebut sesuai dengan doktrin teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber. Di dalam teorinya dijelaskan bahwa tindakan sosial merupakan tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Dalam konteks perceraian, tindakan perempuan menggugat cerai merupakan tindakan sosial dimana tindakan perempuan menggugat cerai mengandung makna atau arti subyektif bagi

dirinya dan diarahkan kepada suaminya. Sementara setiap perempuan yang menggugat cerai memiliki motif, arti atau makna yang berbeda-beda tentang perceraian maka perlu penafsiran dan pemahaman yang mendalam terkait setiap tindakan sosial perempuan menggugat cerai.

Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan tindakan sosial perempuan menggugat cerai dapat dijelaskan menggunakan beberapa teori sosial. Misalnya Parsons dalam konsep tindakan sosial dengan menggunakan konsep alat tujuan (*means ends framework*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Weber, dari bukunya tentang *the Structure of social action* menyangkut konsep tindakan sosial yang rasional. Menurut Talcott Parsons aksi tidak termasuk ke dalam perilaku atau *behaviour*. Aksi adalah tindakan mekanis atas stimulus sedangkan perilaku merupakan proses mental yang aktif dan kreatif. Asumsinya adalah hal yang utama itu bukan tindakan individu akantetapi norma-norma, nilai-nilai sosial itulah yang telah mengatur perilaku. Akantetapi pada kenyataannya selain hal-hal tersebut di atas, tindakan individu manusia itu juga ditentukan oleh orientasi subjektifnya, yaitu berupa orientasi motivasional dan orientasi nilai. Sedangkan konsep tindakan sosial menurut Max Weber adalah tindakan bermakna yang merupakan hasil atas kejadian suatu stimulus dan respon. Tindakan tersebut dapat dikatakan terjadi apabila terdapat makna subyektif dalam tindakan yang dilakukan oleh para individu. Weber lebih berfokus pada para individu, pola-pola, regularitas dan tidak pada kolektivitas. Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan Max Weber yang dianggap cukup relevan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian. Selain itu konsep Feminisme juga digunakan penulis sebagai pelengkap dalam membantu

mengkaji permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan pandangan tersebut maka penelitian ini berjudul :***“Tindakan Sosial Perempuan Gugat Cerai Studi Kasus Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang”***.

Pemakaian kata tindakan sosial dalam judul Tindakan Sosial Perempuan Gugat Cerai Studi Kasus Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang merupakan konsep tindakan sosial dari Max Weber. Dimana tindakan sosial merupakan tindakan yang mempunyai makna subyektif bagi individu dan diarahkan kepada orang lain serta merupakan respon atas tindakan orang lain. Dalam konteks penelitian ini tindakan perempuan yang menggugat cerai di Kecamatan Kasembon merupakan tindakan sosial yang memiliki arti subyektif bagi para perempuan (istri) yang melakukan gugat cerai di Kecamatan Kasembon dan tindakan tersebut diarahkan pada suaminya serta merupakan respon atas tindakan suaminya. Sehingga dalam judul penelitian ini penulis menggunakan tindakan sosial yang sesuai dengan konsep tindakan sosial Max Weber.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana tipe tindakan sosial istri yang menggugat cerai di Kecamatan Kasembon ?
2. Bagaimana para istri memaknai tindakan sosial menggugat cerai di Kecamatan Kasembon ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami tipe tindakan sosial istri yang menggugat cerai di Kecamatan Kasembon.
2. Untuk mengetahui dan memahami pemaknaan tindakan sosial istri menggugat cerai di Kecamatan Kasembon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu sosiologi dan ilmu lain yang terkait dengan hasil penelitian ini
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang akademis, dan referensi dalam masalah perceraian

E. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, agar cakupan masalah tidak meluas dan melebar maka diperlukan fokus penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan di Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang yang meliputi lima desa diantaranya : Pondokagung, Bayem, Kasembon, Wonoagung dan Sukosari. Cakupan masalah yang dibahas tidak akan keluar dari rumusan masalah yang ada , dimana difokuskan pada : Tindakan Sosial Perempuan Gugat Cerai di Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Oleh sebab itu pembahasan dalam penelitian ini tidak akan meluas dan melebar dari rumusan masalah yang telah ada.